



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN**  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG**  
Jl.Kapten.A.Rivai No.90 Palembang 30135 No.Telp/Fax :0711-350216  
Email: bapas\_palembang@yahoo.co.id

31 Desember 2023

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan  
Di tempat

**SURAT – PENGANTAR**  
**NOMOR : W6.PAS.PAS.UM-5528 / 2023**

No	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2023	1 (berkas) berkas	Dengan hormat disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Kepala,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Sudirwan**  
**NIP 1970180219930301001**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia di Jakarta

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN**



**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang ini dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Balai Pemasarakaytan Kelas I Palembang atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2023 dibuat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang dalam pencapaian target kinerja sepanjang tahun 2023. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa yang akan datang.

Akhir kata, melalui penyampaian LKjIP Balai Pemasarakatan Bapas Kelas I Palembang Tahun 2023 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Kepala Bapas Palembang,



**Sudirwan**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bapas Kelas I Palembang dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Di dalam Perjanjian Kinerja Bapas Kelas I Palembang memiliki 2 sasaran kegiatan yang harus dilaksanakan pimpinan Bapas Kelas I Palembang beserta jajaran. 2 sasaran itu adalah Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar dan Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker. Secara keseluruhan capaian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2023 dapat dinyatakan **“berhasil”**, karena telah memenuhi target capaian dan telah terealisasi. Dalam mendukung capaian kinerja Tahun 2023 Pagu Anggaran sebesar **Rp 8.626.156.000,-** telah direalisasi sebesar **Rp Rp 8.490.843.330,-** atau 98.43%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebagaimana dijelaskan tersebut di atas menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan IKK Bapas Kelas I Palembang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan Klien Pemsarakatan dan Pemenuhan hak Pendidikan Klien anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	60 %
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	55 %
		Persentase Klien Anak yang terpenuhinya hak pendidikannya	35%	35 %

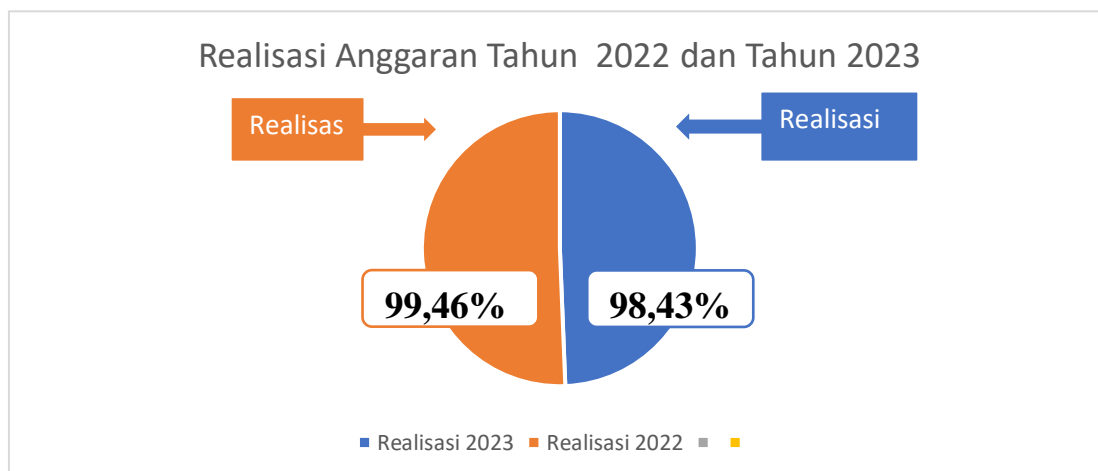
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	8 Unit	8 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3 Unit	3 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	60 Unit	60 Unit
		9. Jumlah Gedung / Bangunan	2 Unit	2 Unit

Adapun sasaran kegiatan yang telah dicapai sepanjang Tahun 2023 sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan 1 (satu) dengan indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1), “*Persentase Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga*” dengan target persentase 60% dan telah terealisasi 100% , indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK 2), “*Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara*” dengan target persentase 55% dan telah terealisasi 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK 3), “*Persentase Klien Anak yang terpenuhinya hak pendidikannya*” dengan persentase 35% dan telah terealisasi 100 %,
- Sasaran Kegiatan 2 (dua) dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1), “*Tersusunnya dokumen*

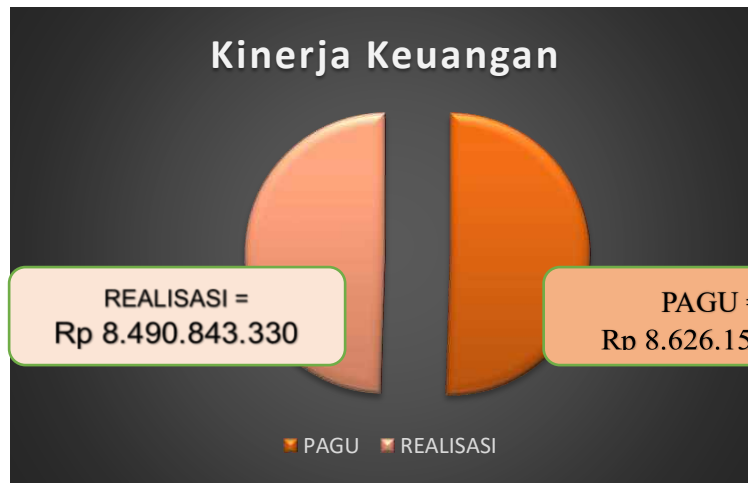
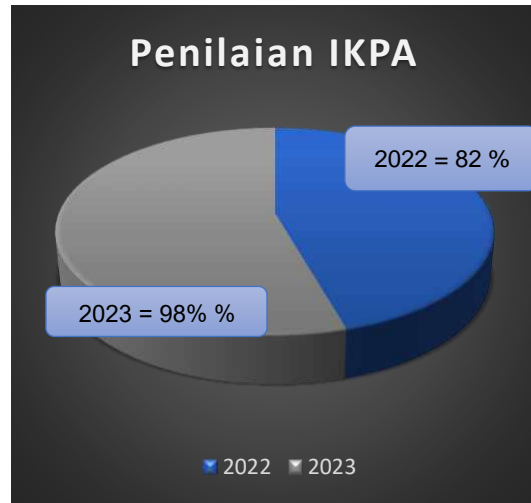
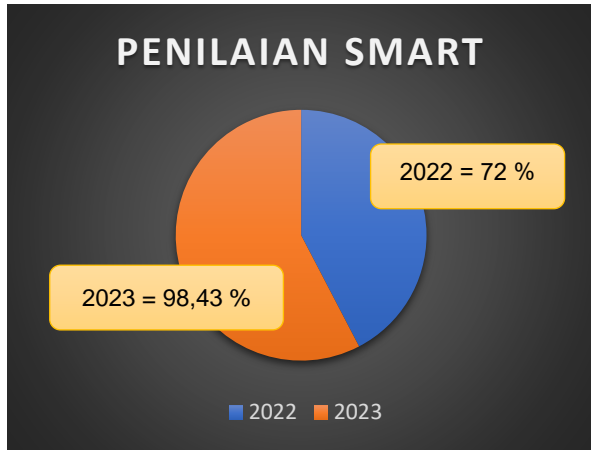
*rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu*” dengan target 1 Layanan dan telah terealisasi 1 Layanan, Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK 2), *“Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan “*, dengan target 1 Layanan dan telah terealisasi 1 Layanan, Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK 3), *“Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasaryakatan”* dengan target 1 Layanan dan telah terealisasi 1 Layanan, Indikator Kinerja Kegiatan 4 (IKK 4), *“Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu”* dengan target 1 Layanan dan telah terealisasi 1 Layanan, Indikator Kinerja Kegiatan 5 (IKK 5), *“Jumlah Layanan Perkantoran”* dengan target 1 Layanan dan telah terealisasi 1 Layanan, Indikator Kinerja Kegiatan 6 (IKK 6), *“Jumlah Kendaraan Bermotor”* dengan target 8 Unit dan telah terealisasi 8 unit motor, Indikator Kinerja Kegiatan 7 (IKK 7), *“Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”* dengan target 3 Unit dan terealisasi 3 unit, Indikator Kinerja Kegiatan 8 (IKK 8), *“Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran”* dengan target 60 unit dan telah teralisasi 60 unit, Indikator Kinerja Kegiatan 8 (IKK 8), *“Jumlah Gedung / Bangunan”* dengan target 2 unit dan telah terealisasi 2 unit.

*Gambar.1. Realisasi Anggaran Tahun 2022-2023*



Berdasarkan tabel diatas, adapun realisasi anggaran Balai Pemasaryakatan Kelas I Palembang tahun 2023 yaitu sebesar **98.43 %**

Gambar 2  
 Capaian SMART, IKPA dan Kinerja Keuangan Tahun 2023



Berdasarkan grafik diatas, adapun capaian SMART tahun 2023 sebesar 98.43%, capaian IKPA sebesar 98%, dan Capaian Kinerja sebesar 98.43%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komperehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja lapran kinerja pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang

**DAFTAR ISI**

	<b>HAL</b>
Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	9
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang	10
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
C. Maksud dan Tujuan	13
D. Aspek Strategis	14
E. Isu Strategis	14
F. Sistematika Laporan	14
<b>BAB II. Perencanaan Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja	24
<b>BAB III. Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	54
C. Capaian Kinerja Anggaran	56
D. Capaian Kinerja Lainnya	58
<b>BAB IV. Penutup</b>	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
Lampiran-Lampiran	



## DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Sasaran Kegiatan IKK Bapas Kelas I Palembang	2
Tabel I.1	Data pegawai Bapas Kelas I Palembang	11
Tabel II.1	Indikator Kinerja Kegiatan	24
Tabel II.2	Klasifikasi Capaian	26
Tabel III.1	Capaian Kinerja Bapas Kelas I Palembang	27
Tabel III.3	Target, Realisasi dan Capaian SK I dan IKK 1	29
Tabel III.4	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian SK I dan IKK 1	29
Tabel III.5	Target Jangka Menengah SK I dan IKK I	29
Tabel III.6	Target, Realisasi dan Capaian SK I dan IKK 2	31
Tabel III.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian SK I dan IKK 2	32
Tabel III.8	Target jangka Menengah SK I dan IKK 2	32
Tabel III.9	Target, Realisasi dan Capaian SK I dan IKK 3	34
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian SK I dan IKK 3	34
Tabel III.11	Target Jangka Menengah SK I dan IKK 3	34
Tabel III.13	Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 1	37
Tabel III.14	Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 1	37
Tabel III.15	Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 1	38
Tabel III.17	Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 2	39
Tabel III.18	Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 2	39
Tabel III.19	Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 2	40
Tabel III.20	Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 3	41
Tabel III.21	Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 3	41
Tabel III.22	Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 3	41
Tabel III. 23	Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 4	43
Tabel III. 24	Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 4	43
Tabel III.25	Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 4	44
Tabel III. 26	Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 5	45
Tabel III.27	Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 5	45

Tabel III.28 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 5	45
Tabel III.29 Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 6	46
Tabel III.30 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 6	46
Tabel III.31 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 6	47
Tabel III.32 Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 7	48
Tabel III.33 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 7	48
Tabel III.34 Target Jangka Menengah 2 dan IKK 7	49
Tabel III.35 Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 8	50
Tabel III.36 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 8	50
Tabel III.37 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 8	50
Tabel III.38 Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 9	51
Tabel III.39 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 9	51
Tabel III.40 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 9	52
Tabel III.41 Realisasi Anggaran Belanja	54
Tabel III.42 Realisasi Anggaran Per Sasaran	54
Tabel III.43 IKPA	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023	4
Gambar 2	Capaian SMART, IKPA dan Kinerja Keuangan Tahun 2023	5
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bapas Kelas I Palembang	13
Gambar III.2	Sasaran Kegiatan 1 dan 3 Indikator Kinerja	28
Gambar III.12	Sasaran Kegiatan 2 dan 9 Indikator Kinerja	36
Gambar III.44	SMART	57
Gambar III. 45	E-Performance	58
Gambar III.46	E-Monev	59
Gambar III.47	Target Kinerja	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang merupakan salah satu Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang mulai berdiri pada tahun 1974 dengan nama Balai BISPA yang kini beralamat di Jalan Kapten A. Rivai no.90 Palembang. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tugas Pembimbing Kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat (1) keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.0-PK.10 Tahun 1998. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, demikian pula PP Nomor 31 tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan, dimana unsur utamanya adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mempunyai tugas utama untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan dan mempunyai fungsi untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam persidangan, Menyusun program Bimbingan Klien Pemasyarakatan, mengikuti Sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan Registrasi Klien Pemasyarakatan, melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan, memberikan bantuan bimbingan kepada bekas Narapidana, Anak Didik dan klien Pemasyarakatan yang membutuhkan (*aftercare*) dan melaksanakan urusan tata usaha Bapas.

Struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang terdiri dari Kepala Balai Pemasyarakatan, Kepala Subseksi Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak. Kepala Urusan Tata Usaha terbagi menjadi 3 (tiga) Subseksi yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Keuangan. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kepala Subseksi Registrasi Klien Dewasa, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa dan Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kepala Subseksi Registrasi Klien Anak, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak dan Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Anak. Kepala Bapas Kelas I Palembang mempunyai tugas memonitoring Tugas Seksi Tata Usaha, Bimbingan Klien Dewasa dan Bimbingan Klien Anak, membantu Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas di bidang Penelitian, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Klien. Kepala Subseksi Urusan Tata Usaha mempunyai tugas meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi

kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang secara keseluruhan yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas meningkatkan pelayanan dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Dewasa. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas meningkatkan pelayanan dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Anak.

Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang memiliki pegawai yang berjumlah 94 orang yang dirinci sebagai berikut:

*Tabel I.1. Data Pegawai Bapas Kelas I Palembang*

Jenis Kelamin		Golongan ruang								Pendidikan				
LK	PR	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	SMA	DIII	DIV	SI	S2
55	39	1	2	29	22	16	15	5	4	5	1	5	63	20

Laporan LKjIP Tahun 2023 Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *"good governance"*.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi dalam Melaksanakan penelitian kemasarakatan, Melakukan registrasi klien pemasarakatan; Melakukan bimbingan kemasarakatan dan pengentasan anak; Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasarakatan yang memerlukan; Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan.

### **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang terdiri dari Kepala Balai Pemasarakatan, Kepala Subseksi Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak. Kepala Urusan Tata Usaha terbagi menjadi 3 (tiga) Subseksi yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Keuangan. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kepala Subseksi Registrasi Klien Dewasa, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasarakatan Klien Dewasa dan Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kepala Subseksi Registrasi Klien Anak, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasarakatan Klien Anak dan Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Anak. Kepala Bapas Kelas I Palembang mempunyai tugas memonitoring Tugas Seksi Tata Usaha, Bimbingan Klien Dewasa dan Bimbingan Klien Anak, membantu Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas di bidang Penelitian, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Klien. Kepala Subseksi Urusan Tata Usaha mempunyai tugas meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang secara keseluruhan yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas meningkatkan pelayanan dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Dewasa. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas meningkatkan pelayanan dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Anak

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bapas Kelas I Palembang



### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

#### **D. ASPEK STRATEGIS**

Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang memiliki peranan penting dalam Melaksanakan penelitian kemasyarakatan, Melakukan registrasi klien pemasarakatan; Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak; Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasarakatan yang memerlukan; Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan.

#### **E. ISU STRATEGIS**

- Adapun Isu Strategis yang terdapat pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang antara lain yaitu Kurangnya pegawai administrasi untuk pembagian tugas dan fungsi Bapas, Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan seperti : meja kursi kerja dan lemari arsip, kurangnya ruangan yang menampung 94 orang pegawai dan Kurangnya Komputer Server dan perekam sidik jari untuk pengelolaan data klien (SDP).
- komitmen melayani dari para pegawai yang masih perlu ditingkatkan, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu dimaksimalkan.

#### **F. SISTEMATIKA LAPORAN**

LKjIP Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Bapas Palembang selama Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang adalah sebagai berikut :

##### **1. Ikhtisar Eksekutif**

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

##### **2. Bab I Pendahuluan**



### **3. Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

### **4. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

### **5. Bab IV Penutup**

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1. VISI

Bapas Bapas Kelas I Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM menjalankan visi sesuai dengan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yaitu:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

##### 2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun misi yang dijalankan yaitu:

##### a. **Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- 1) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- 2) regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- 3) terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- 4) tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- 5) terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

#### **b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas**

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan

sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

**c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

- bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

#### **d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat padadirinya setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan-tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran sertamasyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi

dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi

manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

**e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a) Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki

- b) Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
- c) Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di

dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan nkri.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial- kemasyarakatan

**f. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan**

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RIdi luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertibandi Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

**g. Melaksanakan Tata Laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan**

Pada misi ketujuh Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan public.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai "**BerAKHLAK**" yang memiliki makna:

1. **Berorientasi Pelayanan;** Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; Melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel;** Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten;** Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; Membantu orang lain belajar; Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. **Harmonis;** Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; Suka menolong orang lain; Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. **Loyal;** Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. **Adaptif;** Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; Bertindak proaktif.
7. **Kolaboratif;** Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan Bersama



dengan tahun 2020-2024 yaitu ”PASTI” yang mempunyai makna:

- 1) **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjungtinggietika dan integritasprofesi.
  
- 2) **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahandapat dipertanggungjawababkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
  
- 3) **Sinergi**, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
  
- 4) **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atas kebebasan bagi setiap orang untukmemperoleh inforrmasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
  
- 5) **Inovatif**, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

## B. PERJANJIAN KINERJA

Adapun Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah: 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi; 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

*Tabel 2.1. Indikator Kinerja Kegiatan Bapas Kelas I Palembang*

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan hak Pendidikan Klien anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		Persentase Klien Anak yang terpenuhinya hak pendidikannya	35%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	<b>1 Layanan</b>
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	<b>1 Layanan</b>
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	<b>1 Layanan</b>
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	<b>1 Layanan</b>
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	<b>1 Layanan</b>
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	<b>8 Unit</b>
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	<b>3 Unit</b>
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	<b>60 Unit</b>
		9. Jumlah Gedung / Bangunan	<b>2 Unit</b>

Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kepala Balai Masyarakat Kelas I Palembang pada tahun 2022 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan sebagai pemberi amanah kepada Kepala Balai Masyarakat Kelas I Palembang sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target.

Dalam monitoring setiap Indikator Kinerja Utama yang ada di setiap unit, Direktorat Jenderal Masyarakat merumuskan indeks capaian. Hal ini diperlukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator Kinerja sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Masyarakat dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator Kinerja yang ada, Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah:

Tabel 2.2. Klasifikasi Capaian

RANGE	KETERANGAN
100 – 120	Sangat Memuaskan (Excellent)
80 – 99	Memuaskan (Good)
70 – 79	Cukup Memuaskan (Caution)
60 – 69	Kurang Memuaskan (Poor)
< 60	Tidak Memuaskan (Very Poor)

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Untuk capaian kinerja yang melebihi angka 120 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan Konversi Efisiensi Kinerja sebesar 120, sehingga bagi nilai capaian kinerja yang melebihi nilai 120 akan dikonversi ke nilai 120.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasaryakatan atasamanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

*Tabel. III. 1*

*Capaian Kinerja Balai Pemasaryakatan Kelas I Palembang Tahun 2023*

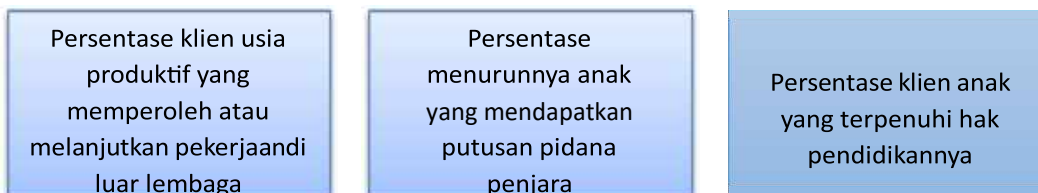
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan Klien Pemasaryakatan dan Pemenuhan hak Pendidikan Klien anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	60%	100%
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	55%	100%
		Persentase Klien Anak yang terpenuhinya hak pendidikannya	35%	35%	100%
2	Meningkatnya dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %

2.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
3.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
4.	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %
5.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %
6.	Jumlah Kendaraan Bermotor	8 Unit	8 Unit	100 %
7.	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3 Unit	3 Unit	100 %
8.	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	60 Unit	60 Unit	100 %
9.	Jumlah Gedung / Bangunan	2 Unit	2 Unit	100 %

Gambar III.2. Sasaran Kegiatan 1 dan 3 Indikator Kinerja

<b>SASARAN KEGIATAN 1 :</b>
<b>MENINGKATNYA PELAYANAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KLIEN ANAK PADA LUAR LEMBAGA DI WILAYAH SESUAI STANDAR</b>

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan:



**Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga”**

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga merupakan indicator kinerja kegiatan terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Bapas Kelas I Palembang . Capaian kinerja diperoleh melalui register pembimbinganklien dewasa yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang telah di input di Sistem Databaseoleh operator SDP.

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target Persentase klien usia

Target yang ditetapkan adalah 60% sedangkan realisasinya adalah 60% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Tabel. III.3 . Target, Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian*
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	60%	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga tahun 2022 sebesar 50%, hal ini meningkat pada tahun 2023 sebesar 60 %.

Tabel. III.4 . Perbandingan Target dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 1

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	50%	100 %	60%	60%	100%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga tahun 2022 adalah 50% dengan realiasi 100% sementara target di tahun 2023 adalah 60% dengan realisasinya 100%

Tabel. III.5 . Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 1

Indikator	Target	
	2022	2023

Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	60%
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian dari indicator persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga adalah :

- Tersedianya laporan data klien pemasyarakatan pada register pembimbingan
- Peningkatan disiplin kerja pegawai Bapas
- Monitoring dan evaluasi terhadap pembimbingan serta pengawasan kepada klien pemasyarakatan
- Sinergitas klien pemasyarakatan dengan pihak Pembimbing Kemasyarakatan terkait wajib lapor

Kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan tersebut diantaranya :

- Masih adanya klien pemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Bapas terkait wajib lapor
- Masalah perekonomian yang membuat klien pemasyarakatan sulit mendapatkan pekerjaan
- Tidak adanya keterampilan yang dapat dijadikan modal dalam mencari pekerjaan maupun dalam membuka usaha sendiri

Meskipun terdapat kendala pada tahun 2023, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan diantaranya:

- Mengingatkan klien pemasyarakatan terkait wajib lapor oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bersangkutan rutin melaksanakan kewajibannya
- Menghubungi/mengunjungi penjamin jika klien pemasyarakatan tidak dapat dihubungi atau pergi ke luar daerah
- Memberitahu klien pemasyarakatan maupun penjamin agar melaporkan masalahnya kepada PK jika terjadi kendala dalam melakukan wajib lapor ke Bapas



## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut melalui :

- Meningkatkan peran PK dalam pengawasan terhadap klien pemasyarakatan untuk kooperatif.
- Meningkatkan peran PK dalam pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan agar lebih siap dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi
- Perlunya peningkatan kualitas kinerja pegawai PK dengan berkoordinasi dengan PK BKO, Asisten PK, dan pihak terkait sehingga menambah wawasan PK saat menghadapi klien

### Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara”

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara merupakan indikator kinerja kegiatan terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Bapas Kelas II Palembang. Capaian kinerja diperoleh melalui register pembimbingan klien dewasa yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang telah di input di Sistem Database oleh operator SDP. Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 55% sedangkan realisasinya adalah 55% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Tabel. III.6 . Target, Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023*	Capaian*
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	55%	100%

#### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara tahun 2022 sebesar 100%,

Tabel. III.7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 2

Indikator	2022			2023*		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	60%	100%	55%	55%	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara tahun 2022 adalah 60% dengan realisasi 100% sementara target di tahun 2023 adalah 55% dengan realisasinya 55%.

Tabel. III.8. Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 2

Indikator	Target	
	2022	2023
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	55%

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian dari indikator persentase klien usia produktif

- Tersedianya laporan data klien pemasyarakatan pada register pembimbingan
- Peningkatan disiplin kerja pegawai Bapas
- Monitoring dan evaluasi terhadap pembimbingan serta pengawasan kepada klien pemasyarakatan
- Sinergitas klien pemasyarakatan dengan pihak Pembimbing Kemasyarakatan terkait wajib lapor.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan tersebut diantaranya :

- Masih adanya klien pemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Bapas terkait wajib lapor
- Masalah perekonomian yang membuat klien pemasyarakatan sulit mendapatkan pekerjaan
- Tidak adanya keterampilan yang dapat dijadikan modal dalam mencari pekerjaan maupun dalam membuka usaha sendiri

Meskipun terdapat kendala pada tahun 2023, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan diantaranya:

- Mengingatkan klien pemasyarakatan terkait wajib lapor oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bersangkutan rutin melaksanakan kewajibannya
- Menghubungi/mengunjungi penjamin jika klien pemasyarakatan tidak dapat dihubungi atau pergi ke luar daerah
- Memberitahu klien pemasyarakatan maupun penjamin agar melaporkan masalahnya kepada PK jika terjadi kendala dalam melakukan wajib lapor ke Bapas

#### **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut melalui :

- Meningkatkan peran PK dalam pengawasan terhadap klien pemasyarakatan untuk kooperatif
- Meningkatkan peran PK dalam pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan agar lebih siap dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi
- Perlunya peningkatan kualitas kinerja pegawai PK dengan berkoordinasi dengan PK BKO, Asisten PK, dan pihak terkait sehingga menambah wawasan PK saat menghadapi klien

**Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya merupakan indikator kinerja kegiatan terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Bapas Kelas I Palembang. Capaian kinerja diperoleh melalui register pembimbingan klien dewasa yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang telah di input di Sistem Database oleh operator SDP. Berdasarkan hasil

penghitungan dapat diketahui bahwa target Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2023 Target yang ditetapkan adalah 35% sedangkan realisasinya adalah 35% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%

*Tabel. III.9. Target, Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 3*

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023*	Capaian*
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	35%	100%

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya tahun 2022 sebesar 100% pada tahun 2023 sebesar 100%.

*Tabel. III.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 3*

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	30%	100%	35%	35%	100%

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase klien anak yang

target di tahun 2023 adalah 35% dengan realisasinya 35%.

Tabel III.11. Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 3

Indikator	Target	
	2022	2023
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	35%

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian dari indicator persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga adalah :

- Tersedianya laporan data klien pemasyarakatan pada register pembimbingan
- Peningkatan disiplin kerja pegawai Bapas
- Monitoring dan evaluasi terhadap pembimbingan serta pengawasan kepada klien pemasyarakatan
- Sinergitas klien pemasyarakatan dengan pihak Pembimbing Kemasyarakatan terkait wajib lapor

Kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan tersebut diantaranya :

- Masih adanya klien pemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Bapas terkait wajib lapor
- Masalah perekonomian yang membuat klien pemasyarakatan sulit mendapatkan pekerjaan
- Tidak adanya keterampilan yang dapat dijadikan modal dalam mencari pekerjaan maupun dalam membuka usaha sendiri

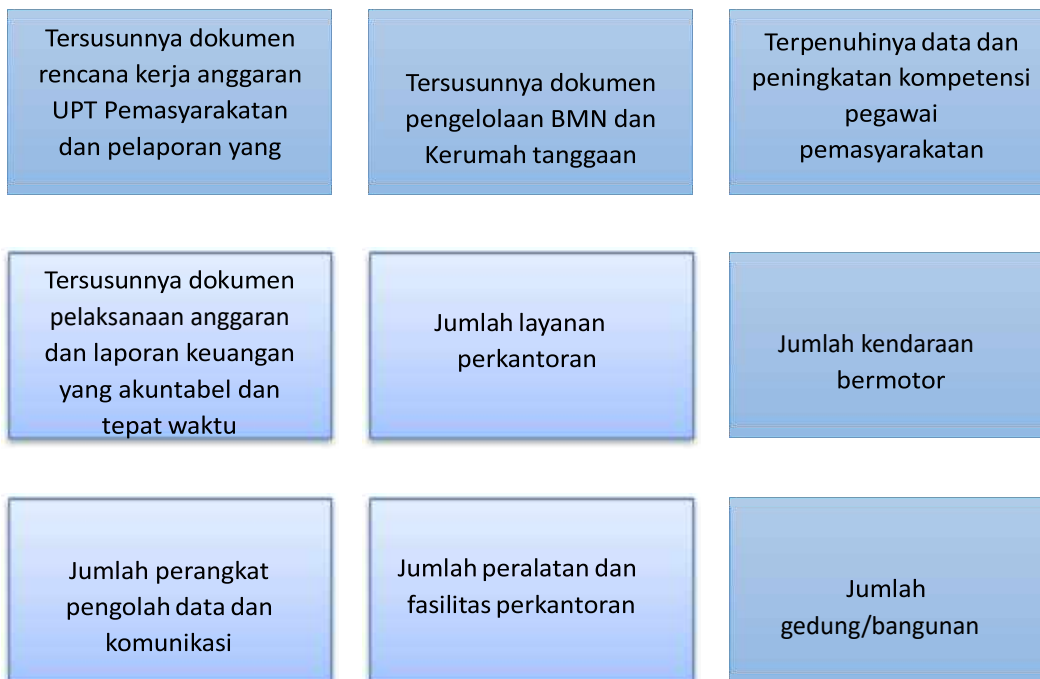
Meskipun terdapat kendala pada tahun 2023, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan diantaranya:

- Mengingatkan klien pemasyarakatan terkait wajib lapor oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bersangkutan rutun melaksanakan kewajibannya.
- Menghubungi/mengunjungi penjamin jika klien pemasyarakatan tidak dapat dihubungi atau pergi ke luar daerah
- Memberitahu klien pemasyarakatan maupun penjamin agar melaporkan masalahnya kepada PK jika terjadi kendala dalam melakukan wajib lapor ke Bapas

Gambar. III.12. Sasaran Kegiatan 2 dan 9 Indikator Kinerja

<b>SASARAN KEGIATAN 2 :</b>
<b>MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER</b>

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan:



**Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu merupakan indicator kinerja kegiatan 1 terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Bapas Kelas I Palembang. Capaian kinerja diperoleh melalui e-performance.

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tahun 2023 sudah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan 1 Layanan dan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja 100%.

*Tabel. III.13. Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 1*

Indikator	Target	Realisasi	Capaian*
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	100%

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tahun 2022 sebesar 100%, hal ini sama pada tahun 2023 sebesar 100% .

*Tabel. III.14. Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 1*

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%

tepat waktu

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tahun 2022 adalah 1 Layanan dengan realiasi 100% sementara target di tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%.

Tabel. III.15 . Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 1

Indikator	Target	
	2022	2023
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan ini dikarenakan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing. Kepala Bapas Kelas I Palembang mengingatkan pegawai agar menjaga sinergitas serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga semakin meningkat dengan menambah pengetahuan serta keterampilan di bidangnya masing-masing.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dengan membuat rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien pada Bapas serta anggaran UPT yang lebih transparan dan terarah agar dalam pelaporan kinerja instansi lebih jelas, akuntabel, dan tepat.



**Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan 2 terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Bapas Kelas I Palembang . Capaian kinerja diperoleh melalui e-performance.

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tahun 2023 sudah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan 1 Layanan dan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja 100%.

*Tabel. III.17. Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 2*

Indikator	Target	Realisasi	Capaian*
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	100%	100%

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tahun 2022 sebesar 100%, hal ini sama pada tahun 2023 sebesar 100 %.

*Tabel. III.18. Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 2*

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di

dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tahun 2022 adalah 1 Layanan dengan realiasi 100% sementara target di tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%.

Tabel. III.19 . Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 2

Indikator	Target	
	2022	2023
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan ini dikarenakan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing. Kepala Bapas Kelas I Palembang mengingatkan pegawai agar menjaga sinergitas serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga semakin meningkat dengan menambah pengetahuan serta keterampilan di bidangnya masing-masing.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dengan membuat rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien pada Bapas serta anggaran UPT yang lebih transparan dan terarah agar dalam pelaporan kinerja instansi lebih jelas, akuntabel, dan tepat.

**Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan 3 terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Bapas Kelas I

Palembang . Capaian kinerja diperoleh melalui e-performance.

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tahun 2023 sudah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan 1 Layanan dan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja 100%.

*Tabel. III.20. Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 3*

Indikator	Target	Realisasi	Capaian*
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	100%	100%

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tahun 2022 sebesar 100%, hal ini sama pada tahun 2023 sebesar 100 %.

*Tabel. III.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 3*

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tahun 2022 adalah 1 Layanan dengan realiasi 100% sementara target di tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%

*Tabel. III.22. Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 3*

Indikator	Target	
	2022	2023
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan ini dikarenakan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing. Kepala Bapas Kelas I Palembang mengingatkan pegawai agar menjaga sinergitas serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga semakin meningkat dengan menambah pengetahuan serta keterampilan di bidangnya masing-masing.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dengan membuat rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien pada Bapas serta anggaran UPT yang lebih transparan dan terarah agar dalam pelaporan kinerja instansi lebih jelas, akuntabel, dan tepat.

### Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu”

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu merupakan Indikator Kinerja Kegiatan 4 terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Bapas Kelas I Palembang . Capaian kinerja diperoleh melalui e-performance.

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tahun 2023 sudah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan 1 Layanan dan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja 100%

Tabel. III.23. Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 4

Indikator	Target	Realisasi	Capaian*
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2022 sebesar 100%, hal ini sama pada tahun 2023 sebesar 100 % karena pelaporan ini masih dalam pada tahun 2023.

Tabel. III.24. Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 4

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2022 adalah 1 Layanan dengan realiasi 100% sementara target di tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%

Tabel. III.25. Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 4

Indikator	Target	
	2022	2023
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang.

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan ini dikarenakan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing. Kepala Bapas Kelas I Palembang mengingatkan pegawai agar menjaga sinergitas serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga semakin meningkat dengan menambah pengetahuan serta keterampilan di bidangnya masing-masing.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dengan membuat rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien pada Bapas serta anggaran UPT yang lebih transparan dan terarah agar dalam pelaporan kinerja instansi lebih jelas, akuntabel, dan tepat.

**Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Jumlah Layanan Perkantoran”**

Jumlah Layanan Perkantoran merupakan Indikator Kinerja Kegiatan 5 terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Bapas Kelas I Palembang . Capaian kinerja diperoleh melalui e-performance.

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tahun 2023 sudah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan 1 Layanan dan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja 100%

Tabel. III.26. Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 5

Indikator	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	100%

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi Jumlah Layanan Perkantoran tahun 2022 sebesar 100%, hal ini sama pada tahun 2023 sebesar 100 % karena pelaporan ini masih pada tahun 2023

Tabel. III.27. Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 5

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Layanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Jumlah Layanan Perkantoran tahun 2022 adalah 1 Layanan dengan realiasi 100% sementara target di tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%.

Tabel. III.28. Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 5

Indikator	Target	
	2022	2023
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Layanan Perkantoran hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan ini dikarenakan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing. Kepala Bapas Kelas I Palembang mengingatkan pegawai agar menjaga sinergitas serta berintegritas dalam

melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga semakin meningkat dengan menambah pengetahuan serta keterampilan di bidangnya masing-masing

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dengan membuat rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien pada Bapas serta anggaran UPT yang lebih transparan dan terarah agar dalam pelaporan kinerja instansi lebih jelas, akuntabel, dan tepat.

### Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Jumlah Kendaraan Bermotor”

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah Kendaraan Bermotor merupakan Indikator Kinerja Kegiatan 6 terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Bapas Kelas I Palembang . Capaian kinerja diperoleh melalui e-performance.

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat tahun 2023 sudah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan 4 Unit dan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Tabel. III.29. Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 6

Indikator	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Kendaraan Bermotor	8 Unit	100%	100%



sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi Jumlah Kendaraan Bermotor pada tahun 2022 nihil dikarenakan tidak adanya indikator jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 100%.

Tabel. III.30. Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 6

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Kendaraan Bermotor	-	-	-	8 Unit	100%	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023. Target kinerja untuk indikator Jumlah Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100% sedangkan ada tahun 2022 nihil dikarenakan indikator jumlah kendaraan bermotor tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel. III.31. Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 6

Indikator	Target	
	2022	2023
Jumlah Kendaraan Bermotor	-	8 Unit

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Kendaraan Bermotor hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang

#### 5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan ini dikarenakan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing. Kepala Bapas Kelas I Palembang mengingatkan pegawai agar menjaga sinergitas serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga semakin meningkat dengan menambah pengetahuan serta keterampilan di bidangnya

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dengan membuat rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien pada Bapas serta anggaran UPT yang lebih transparan dan terarah agar dalam pelaporan kinerja instansi lebih jelas, akuntabel, dan tepat.

**Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi merupakan Indikator Kinerja Kegiatan 7 terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Bapas Kelas I Palembang . Capaian kinerja diperoleh melalui e-performance.

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat tahun 2023 sudah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan 17 Unit dan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja 100%.

*Tabel. III.32. Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 7*

Indikator	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3 Unit	100%	100%

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2022 nihil dikarenakan Indikator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

*Tabel. III.33. Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 7*

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	-	3 Unit	100%	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023. Target kinerja untuk indikator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%. Sedangkan pada tahun 2022 nihil dikarenakan Indikator Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel. III.34. Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 7

Indikator	Target	
	2022	2023
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	3 Unit

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang

### 5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan ini dikarenakan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing. Kepala Bapas Kelas I Palembang mengingatkan pegawai agar menjaga sinergitas serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga semakin meningkat dengan menambah pengetahuan serta keterampilan di bidangnya masing-masing.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dengan membuat rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien pada Bapas serta anggaran UPT yang lebih transparan dan terarah agar dalam pelaporan kinerja instansi lebih jelas,

**Indikator Kinerja Kegiatan 8 “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran merupakan Indikator Kinerja Kegiatan 8 terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Bapas Kelas I Palembang . Capaian kinerja diperoleh melalui e-performance.

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tahun 2023 sudah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan 24 Unit dan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja 100%.

*Tabel. III.35. Target, Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 8*

Indikator	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	60 Unit	100%	100%

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada tahun 2023 sebesar 100 %. Sedangkan pada tahun 2022 nihil dikarenakan Indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

*Tabel. III.36. Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 8*

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	-	60 Unit	100%	100%

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di

Perkantoran pada tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%. Sedangkan pada tahun 2022 nihil dikarenakan Indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel. III.37. Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 8

Indikator	Target	
	2022	2023
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	60 Unit

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional**

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang

**5. Penyebab Keberhasilan**

Penyebab keberhasilan ini dikarenakan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing. Kepala Bapas Kelas I Palembang mengingatkan pegawai agar menjaga sinergitas serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga semakin meningkat dengan menambah pengetahuan serta keterampilan di bidangnya masing-masing

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dengan membuat rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien pada Bapas serta anggaran UPT yang lebih transparan dan terarah agar dalam pelaporan kinerja instansi lebih jelas, akurat, dan tepat

**Indikator Kinerja Kegiatan 9 “Jumlah Gedung/Bangunan”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Jumlah Gedung/Bangunan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan 9 terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Bapas Kelas I Palembang . Capaian kinerja diperoleh melalui e-performance. Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah Gedung/Bangunan tahun 2023 sudah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan 2 Unit dan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Gedung/Bangunan	2 Unit	100%	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan 2022, realisasi Jumlah Gedung/Bangunan pada tahun 2023 sebesar 100 %. Sedangkan pada tahun 2022 nihil dikarenakan Indikator Jumlah Gedung/Bangunan tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel. III.39. Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 9

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian*
Jumlah Gedung/Bangunan	-	-	-	2 Unit	100%	100%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023. Target kinerja untuk indikator Jumlah Gedung/Bangunan pada tahun 2023 adalah 100% dengan realisasinya 100%. Sedangkan pada tahun 2022 nihil dikarenakan Indikator Jumlah Gedung/Bangunan tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel. III.40. Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 9

Indikator	Target	
	2022	2023
Jumlah Gedung/Bangunan	-	2 Unit

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Gedung/Bangunan hanya dilakukan oleh Bapas Kelas I Palembang

## 5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan ini dikarenakan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing. Kepala Bapas Kelas

melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga semakin meningkat dengan menambah pengetahuan serta keterampilan di bidangnya masing-masing

#### **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun rencana kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dengan membuat rencana kerja yang tepat, efektif dan efisien pada Bapas serta anggaran UPT yang lebih transparan dan terarah agar dalam pelaporan kinerja instansi lebih jelas, akuntabel, dan tepat. Adapun Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Tahun 2023 sebesar 55%. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebesar 50%. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya sebesar 32%, untuk persentase tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan, Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan

tepat waktu Tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%. Dan persentase Membentuk Tim Pengamat Pemasarakatan sesuai standar, Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum, Klien Pemasarakatan yang mendapatkan Pendampingan Peradilan anak sesuai standar, Klien Pemasarakatan yang mendapatkan Pembimbingan dan Pengawasan oleh Pihak Bapas sesuai standar, Klien Pemasarakatan yang mendapatkan Rekomendasi program pelayanan dan pembinaan sesuai standar, Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum, Jumlah layanan perkantoran, Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, Terpenuhinya Reformasi Birokrasi UPT tahun 2023.

### C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang sesuai DIPA T.A 2023 memperoleh anggaran sebesar Rp. 8.916.423.000 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. III.41. Realisasi Anggaran Belanja

No	Keterangan	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
1	Pagu	Rp. 6.825.534.000	Rp. 1.770.622.000	Rp. 30.000.000	Rp. 8.626.156.000
2	Realisasi	Rp. 6.725.313.528	Rp. 1.735.614.966	Rp. 29.914.500	Rp. 8.490.842.994
3	Persentase	98.53 %	98.02%	99.72 %	98.43%
4	Sisa	Rp.100.220.472	Rp. 35.007.034	Rp. 85.500	Rp. 135.315.006

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja pegawai di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang selama Tahun 2023 telah mencapai 98.43%. Hal ini jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 terjadi peningkatan 11,19%. peningkatan ini terjadi dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dilakukan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan. Realisasi belanja barang di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang selama Tahun 2023 telah mencapai 98.02%. Hal ini jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang pada Tahun 2022 terjadi peningkatan 38,14%. peningkatan ini terjadi dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dilakukan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan. Realisasi belanja modal di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang selama Tahun 2023 telah mencapai 99.72%. Secara keseluruhan realisasi anggaran yang telah di capai oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang sebesar 98.43% pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang telah berjalan dan dilaksanakan.

Tabel. III.42. Realisasi Anggaran Per Sasaran

NO	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Penyerapan	Kinerja (%)
1	Meningkatnya pelayananpembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Rp. 883.792.000	Rp. 875.820.000	99,10%
2.	Meningkatnya DukunganLayanan Manajemen Satker	Rp. 7.742.364.000	Rp. 7.615.023.330	98,32%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 8.626.156.000</b>	<b>Rp. 8.490.843.330</b>	<b>98.43%</b>

Berdasarkan tabel di atas, pada Sasaran Kegiatan I, Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu : Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga, Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana



penjara, dan Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya telah mencapai persentase penyerapan sebesar 99.10 % dengan penyerapan anggaran hingga Bulan Desember 2023 sebesar Rp. Rp.875.820.000 dan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 883.792.000 Pada Sasaran Kegiatan II, Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker, dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja, yakni : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan, Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan, Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, dan Jumlah Gedung/ Bangunan, telah mencapai persentase penyerapan anggaran sebesar 98.32 %, dengan penyerapan anggaran hingga Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 7.615.023.330 dan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.742.364.000. Sehingga diketahui hingga Bulan Desember 2023 seluruh penyerapan anggaran Sasaran Kegiatan telah mencapai Rp. **8.490.843.330** dan persentase **98.43%** dengan Anggaran yg tersedia **Rp. 8.626.156.000**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang telah berjalan dengan baik.

#### D. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

##### 1. Nilai IKPA

Tabel. III.43. IKPA

Ket	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	100.00	69.63	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	71.96	100%	71.96
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	10.00	6.96	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
Nilai Aspek	84.82		100.00					25.00			

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu: Revisi DIPA, bobot 10; Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10; Data Kontrak, bobot 10; Penyelesaian Tagihan, bobot 10; Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10; Dispensasi SPM, bobot 5; Penyerapan Anggaran, bobot 20; Capaian Output, bobot 25.

Capaian Kinerja SMART 2023 :  $97,18 \times 60\% = 58,30\%$

Capaian Kinerja IKPA 2023 :  $97,18 \times 40\% = 38,87\%$

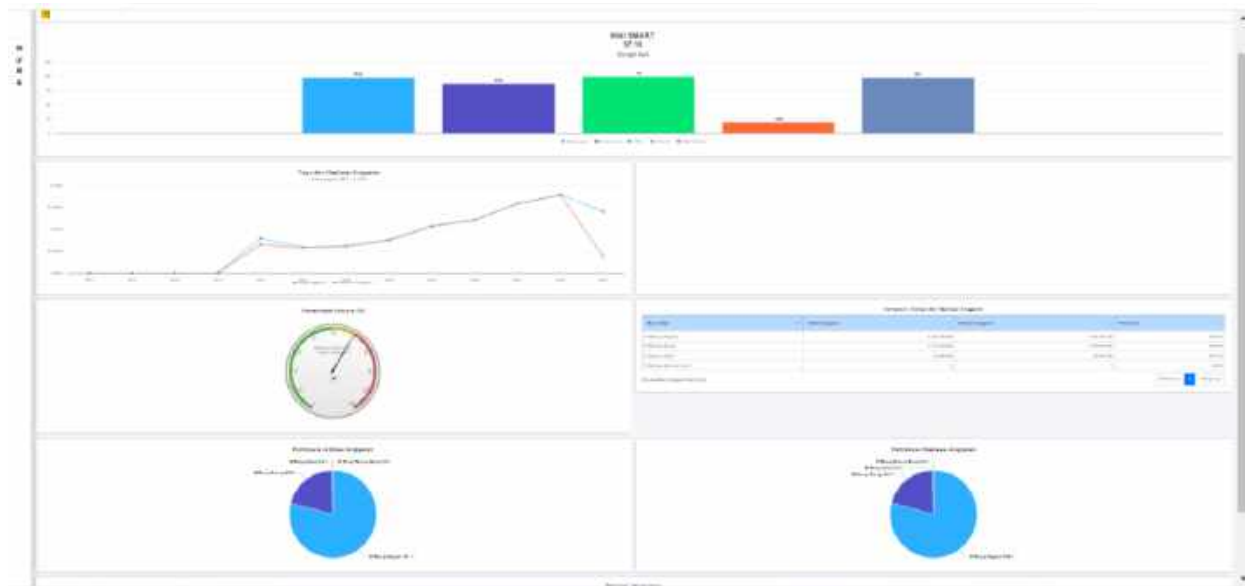
Total Capaian Kinerja pada SMART & IKPA 2023 adalah 97,17%

## 2. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis *website* Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 100%
- Penyerapan Anggaran, bobot 98,43%
- Efisiensi, bobot 19,36%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 87,84%

Gambar III. 44. Nilai SMART 2023



Berdasarkan gambar di atas, nilai penyerapan atau realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Pada Tahun 2023 sebesar 98.43%. Nilai Konsistensi penyerapan atau realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Pada Tahun 2023 sebesar 87,84%. Nilai efisiensi realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Pada Tahun 2023 sebesar 98,84%. Sehingga nilai SMART yang diperoleh Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang sebesar 97.18% dengan kategori sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan dan realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang telah berjalan dan kegiatan yang direncanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang telah terlaksana dengan baik.

## E. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

### 1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Bapas Bapas Kelas I Palembang melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar. III. 45. E-Performance

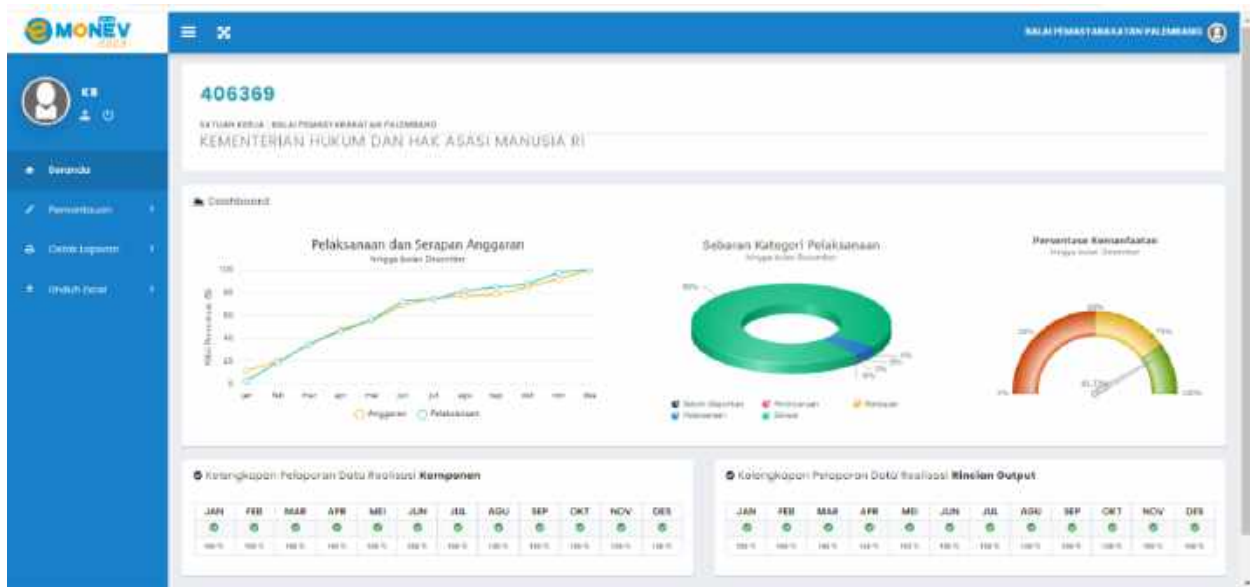
The screenshot displays the E-Performance web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like Home, Dashboard, and various data reports. Below the menu is a banner for 'E-PERFORMANCE' with the subtitle 'SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA'. The main content area is titled 'DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA' and includes a search filter for the year '2023' and the unit 'BALAI PEMASYARAKATAN PALEMBANG'. Below the filter are 'Tampilkan' and 'Tambah' buttons. The main table is titled 'PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 BALAI PEMASYARAKATAN PALEMBANG'. The table has columns for 'NO', 'JABATAN', 'STATUS', 'NO INDIKATOR KINERJA', 'CHECKING', 'MAGAZIN', 'WAKTU PENYELASAAN', 'DIBAYAR', 'DIPERIKSA', 'DIBAYAR', 'DIPERIKSA', 'REALISASI', 'SISWA', 'BERKUALITAS', 'BOSK', and 'BOSK'. The table contains two rows of data, both with a green background for the 'REALISASI' column.

NO	JABATAN	STATUS	NO INDIKATOR KINERJA	CHECKING	MAGAZIN	WAKTU PENYELASAAN	DIBAYAR	DIPERIKSA	DIBAYAR	DIPERIKSA	REALISASI	SISWA	BERKUALITAS	BOSK	BOSK
1	Pemenuhan Perjanjian dan Realisasi Kinerja		1.1. Pemenuhan Perjanjian dan Realisasi Kinerja			30	100%	100%	100%	100%	100%				
			1.1.1. Pemenuhan Perjanjian dan Realisasi Kinerja			30	100%	100%	100%	100%	100%				

## 2. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian /lembaga). Bapas Bapas Kelas I Palembang melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar. III. 46. E-Money



Berdasarkan gambar di atas Kelengkapan pelaporan data realisasi komponen yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas Palembang pada setiap bulannya datanya 100% lengkap. Kemudian untuk kelengkapan pelaporan data realisasi rincian output pada setiap bulannya juga datanya 100% lengkap. Pada pos keuangan penyelenggaraan pemasyarakatan pada Tahun 2023 terserap sebesar 95,50%. Pos keuangan ini terdiri dari pos keuangan pelayanan publik lainnya yang serapan anggarannya sebesar 70,04% (terdiri dari pos keuangan tim pengamat pemasyarakatan); pos keuangan fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang serapan anggarannya sebesar 88,01% (terdiri dari pos keuangan bimbingan kemasyarakatan; pendampingan peradilan anak; pembimbingan dan pengawasan).

Pada pos keuangan dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Pemasyarakatan pada Tahun 2023 terserap sebesar 98,84%. Pos keuangan ini terdiri dari pos keuangan layanan dukungan manajemen internal serapan anggarannya sebesar 60,5% (terdiri dari pos keuangan layanan BMN; layanan hubungan masyarakat; layanan umum; dan layanan perkantoran); pos keuangan layanan sarana dan prasarana internal yang serapan anggarannya 0% (terdiri dari pos keuangan layanan sarana internal); pos keuangan layanan manajemen SDM Internal yang serapan anggarannya sebesar 99,8% (terdiri dari pos keuangan layanan manajemen SDM); pos keuangan layanan manajemen kinerja internal yang serapan anggarannya sebesar 35,4% (terdiri dari pos keuangan layanan perencanaan dan penganggaran; layanan pemantauan dan evaluasi; layanan manajemen keuangan; layanan reformasi kinerja). Berdasarkan data realisasi yang telah disajikan penggunaan dan realisasi anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang telah berjalan dengan baik dan kegiatan yang direncanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang telah terlaksana dengan baik.

### 3. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Adapun capaian Target Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar. III. 47. Target Kinerja



### 4. Kegiatan Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang antara lain:

- Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan;
- Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (POKMAS) untuk pelaksanaan Keadilan restorative.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasarakatan, kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban publik.

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang beserta jajarannya telah melaksanakan perjanjian kinerja secara baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja yang telah memenuhi target. Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan pegawai Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut juga ditunjang oleh program kerja berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang jelas, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk operasional yang dapat dipahami oleh pegawai di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, serta kualitas aparatur yang baik dilihat dari tingkat pendidikannya. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2023 adalah:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM.
2. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemsarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemsarakatan.
4. Belum berjalannya proses pemsarakatan secara optimal, seperti masih adanya Klien yang belum menyadari tanggung jawab dan kewajiban.
5. Adanya Klien yang melakukan pengulangan tindak pidana pada masa PB, CB dan CMB.

#### **B. SARAN**

Mengatasi permasalahan-permasalahan di atas untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang khususnya dalam pencapaian sasaran kegiatan harus dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan maupun diklat teknis.
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
4. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap Klien Pemasarakatan maupun terhadap Petugas Pemasarakatan.
5. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya baik manusia

maupun dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil.

6. Terkait penyerapan anggaran, harus segera melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan menyusun jadwal untuk meningkatkan ketepatan realisasi anggaran.
7. Agar menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin.
8. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti pimpinan dan pegawai.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR:W.6.PAS.PAS20-385.PR.03 TAHUN 2023

T E N T A N G

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LAKIP tahun 2023;
  - b. bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. PP No 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
  4. Perpres 29 / 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  5. Permenpan RB No 53 / 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

KEDUA : Tim bertugas Menghimpun, Mengolah dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jaringan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

KETIGA : Keputusan berlaku dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang Tahun 2023.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya;



Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Bapas Kelas I Palembang

Sudirwan  
NIP 197002181990031001

TembusanYth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
4. Pejabat / Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudirwan, SH  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.  
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I  
Palembang

Sudirwan, SH  
NIP. 197002181990031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85

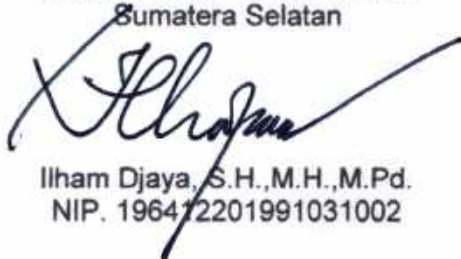
<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	8 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3 unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	60 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	2 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 883,792,000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 883,792,000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6,098,744,000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 6,098,744,000,-

Palembang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.  
NIP. 196472201991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I  
Palembang



Sudirwan, SH  
NIP. 197002181990031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudirwan, SH

Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 10 Januari 2023

Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I  
Palembang



Sudirwan, SH  
NIP.197002181990031001